

**PROFIL DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021**

**1. IDENTITAS KANTOR**

- a. Nama Kantor : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
- b. Alamat Kantor : Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 (Komplek Kantor Gubernur Lama) Gedung B, Lantai 3 – Kupang
- c. Alamat Email : dpmdntt@gmail.com
- d. Nomor Telepon : 0380 – 820532

**2. TUGAS DAN FUNGSI DINAS PMD.**

**a. Tugas**

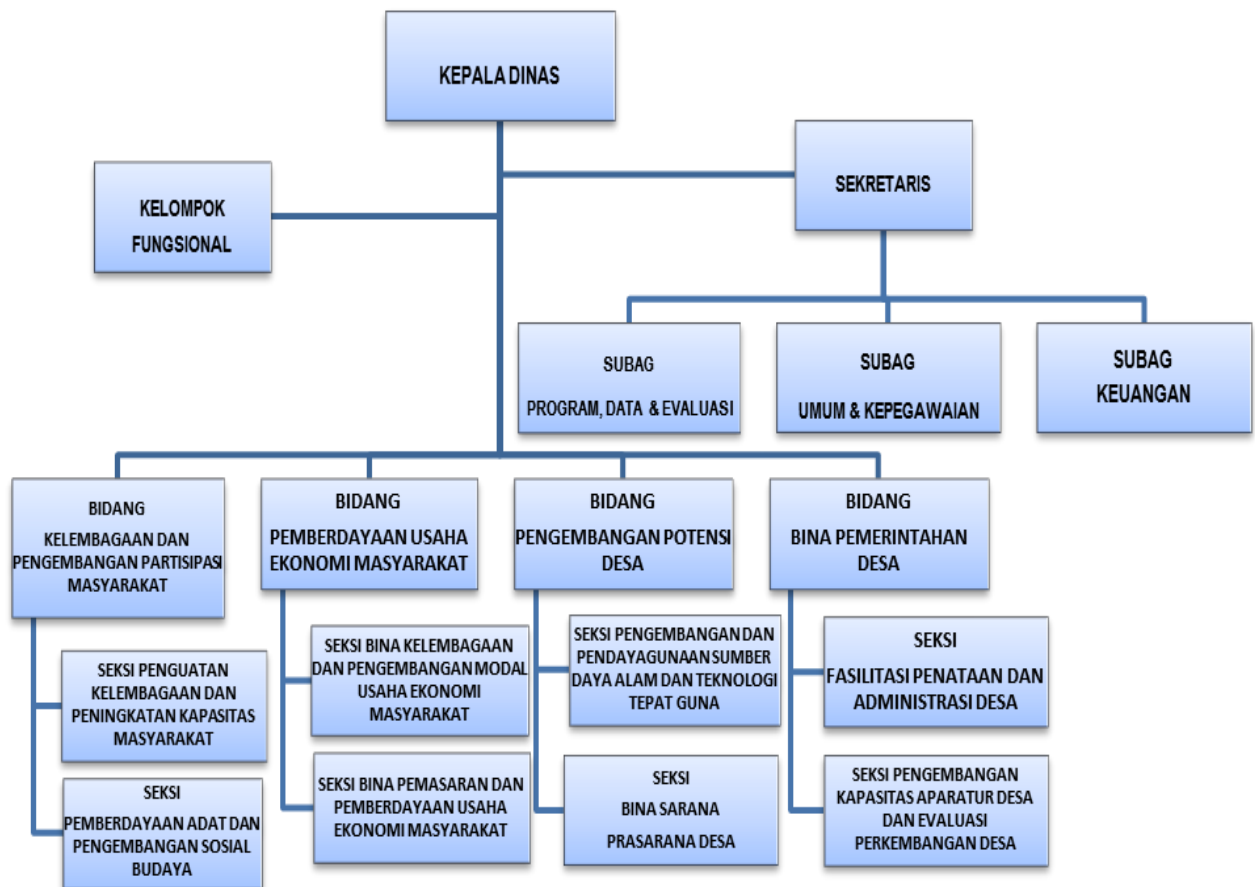
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa mempunyai tugas Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah

**b. Fungsi**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa menyelenggarakan fungsi:

1. Perumuskan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas di bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**c. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PMD :**



#### **d. PROFIL PIMPINAN DINAS PMD**

##### **❖ Identitas Pimpinan**

- 1) Nama Lengkap : Viktorius Manek, S.Sos, M.Si
- 2) NIP : 196910081995031006
- 3) Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda (IV/c)
- 4) Tmp/Tgl.Lahir : Belu, 8 Oktober 1969
- 5) Jenis Kelamin : Laki – Laki
- 6) Agama : Katolik
- 7) Status Perkawinan : Kawin
- 8) Alamat Rumah : Jln. Taebenu 284 RT/RW 08/04 Venun-Baumata

##### **❖ Riwayat Pendidikan**

- 1) SDK Halibot Tahun 1982, HALIBOT
- 2) SMPK DON BOSCO Tahun 1985, Atambua, Kab. Belu
- 3) SMAK SURYA Tahun 1988, Atambua, Kab. Belu
- 4) Sarjana (S1) Tahun 1993, Unika Widya Mandira– Kupang
- 5) Pasca Sarjana (S2) Tahun 2003, Universitas Indonesia

##### **❖ Pengalaman Jabatan/Pekerjaan**

- 1) Staf pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi NTT (Tahun 1995 - 1996)
- 2) Kepala Sub Bagian Tata Kota dan Tata Ruang pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi NTT (Tahun 1997 s.d 1999)
- 3) Kepala Sub Bagian Perkotaan pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi NTT (Tahun 2000 s.d 2001)
- 4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi NTT (Tahun 2004 s.d 2007)
- 5) Kepala Bagian Umum pada Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi NTT (Tahun 2007 s.d 2009)
- 6) Kepala Bagian Pemerintahan Umum pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah provinsi NTT (Tahun 2009 s.d 2010)
- 7) Kepala Bagian Pengembangan Daerah, Pejabat Politik/Daerah pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi NTT (Tahun 2010 s.d 2013)
- 8) Kepala Bagian Pers dan Kajian Pendapat Umum pada Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi NTT ( Tahun 2013 s.d 2015)
- 9) Kepala Bagian Pengembangan Daerah, Pejabat Politik/Daerah pada Biro Pemerintahan Pada Sekretariat Daerah Provinsi NTT (Tahun 2016 s.d 2017)

- 10) Kepala Biro Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Provinsi NTT (Tahun 2018)
- 11) Kepala Badan Penghubung Pemerintah Provinsi NTT di Jakarta (Tahun 2019-2020)
- 12) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT (Tahun 2021 sampai sekarang)

#### ❖ **Pengalaman Organisasi**

- 1) BPM FISIP UNWIRA Kupang sebagai Ketua Bidang Penalaran Tahun 1991 s.d 1993
- 2) Senat Mahasiswa FISIP UNWIRA sebagai Ketua 1 Tahun 1992 s.d 1993
- 3) Kwartir Daerah Pramuka NTT sebagai Sekretaris Tahun 2015 s.d 2020
- 4) PMKRI Sto. Fransiskus Xaverius Kupang sebagai Koordinator Universitas Tahun 1993 s.d 1994
- 5) KORPPRI sebagai Anggota Tahun 1995
- 6) Pemuda Katolik Kota Kupang sebagai Ketua Umum Tahun 1996 s.d 1999
- 7) Pemuda Katolik Komda NTT sebagai Wakil Ketua Tahun 1999 s.d 2003
- 8) THS – THM Distrik Keuskupan Agung Kupang sebagai Sekretaris Umum Tahun 2005 s.d 2010
- 9) Forum Komunikasi Badan Penghubung se Indonesia (FORKAPPSI) sebagai Ketua Umum Tahun 2019

## e. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 2021

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Kuantitas	Pagu Anggaran
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			
<b>1</b>	<b>Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> <b>Sub Kegiatan:</b>			
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi	1 dokumen	106.362.090
1.2	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Provinsi	1 dokumen	9.017.400
1.3	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Provinsi	1 dokumen	6.271.355
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Provinsi	12 Bulan	8.774.230
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Provinsi	12 Bulan	6.271.355
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi	12 laporan	13.599.080
1.7	Evaluasi Capaian Kinerja	Provinsi	4 dokumen	178.506.250
<b>2</b>	<b>Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat daerah</b> <b>Sub Kegiatan:</b>			
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi	14 Bulan	6.509.958.000
2.2	Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi	12 Bulan	12.211.975
2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Provinsi	12 Bulan	1.799.750
2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun	Provinsi	12 Bulan	3.291.425
2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan	Provinsi	12 Bulan	8.181.050
2.6	Penyusunan Pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi anggaran	Provinsi	12 Bulan	1.028.775
<b>3</b>	<b>Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat daerah</b> <b>Sub Kegiatan:</b>			
3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah	Provinsi	12 Bulan	52.839.360
3.2	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Provinsi, Kab. Belu	4 Kali	12.147.108
3.3	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Provinsi	12 Bulan	12.768.482
<b>4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah</b> <b>Sub Kegiatan:</b>			
4.1	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin	Provinsi	12 Bulan	5.291.000

4.2	Pendataan dan Pengolahan administrasi kepegawaian	Provinsi	12 Bulan	6.463.412
4.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kpegawaian	Provinsi	12 Bulan	8.792.000
4.5	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Provinsi	12 Bulan	17.104.590
4.6	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Provinsi	1 kegiatan	7.254.872
4.7	Bimtek Peraturan Perundang-undangan	Provinsi	2 Kali	13.719.000
<b>5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b> <b>Sub Kegiatan:</b>			
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Provinsi	12 Bulan	4.079.200
5.2	Penyediaan barang cetakan	Provinsi	12 Bulan	10.010.000
5.3	Penyediaan bahan bacaan	Provinsi	12 Bulan	7.820.800
5.4	Penyediaan bahan material	Provinsi	12 Bulan	37.498.769
5.5	Fasilitasi kunjungan tamu	Provinsi	12 Bulan	12.474.000
5.6	Penyelenggaraan rapat konsultasi SKPD	Provinsi, Dalam dan Luar Daerah	1 kegiatan	167.826.000
5.7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik	Provinsi	12 Bulan	127.239.360
<b>6</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah</b> <b>Sub Kegiatan:</b>			
6.1	Pengadaan Mebel	Provinsi	1 paket	27.900.000
6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi	1 paket	24.421.600
<b>7</b>	<b>Kegiatan: Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> <b>Sub Kegiatan:</b>			
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi	12 Bulan	6.944.000
7.2	Jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan jasa pelayanan umum kantor - Licensi Zoom Meeting 2 host /100 Participant /tahun - Langganan Wifi	Provinsi	12 Bulan	195.373.040
7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi	12 Bulan	249.320.740
<b>8</b>	<b>Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> <b>Sub Kegiatan:</b>			
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi	12 Bulan	102.545.360
8.2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Provinsi	12 Bulan	6.500.000

8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Provinsi	12 Bulan	26.488.000
<b>II</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>			
<b>A</b>	<b>PROGRAM ADMINITRASI PEMERINTAHAN DESA</b>			
1	<b>Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b> <b>Sub Kegiatan:</b>			
1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kab/Kota dan Perbup/ walikota yang mengatur Desa - Rapat Penataan Desa	Provinsi	1 dokumen	49.958.860
1.2	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa - Pengawalan Perencanaan Pembangunan Rumah layak huni di Provinsi NTT	Kab. Sumba Barat, Belu, TTS, Manggarai Timur, Sabu Raijua, Sumba Barat Daya, Malaka	7 Laporan	60.245.660
	- Rapat Koordinasi Dinas PMD se NTT	Kab. TTS	1 keg. (44 Org)	108.564.490
	- Koordinasi program P3MD dan Pemerintahan Desa di Kementerian	Luar Daerah	1 Kali	8.559.000
1.4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa - Bimtek pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Malaka	1 keg. (30 Org)	98.643.580
1.5	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan - Lomba Desa/Kelurahan	22 Kab/Kota	1 kegiatan	245.300.550
	- Temu Karya Juara I Kab./Kota Se- NTT	Provinsi (Kota Kupang)	1 kegiatan	173.657.260
1.6	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa - Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sekretaris Desa	Kab. Belu	1 keg. (40 Org)	129.307.340
1.7	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD - Pelatihan Peningkatan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bagi Anggota BPD	Kab. TTS	1 keg. (40 Org)	116.621.010
1.8	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUMDesa Kab/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa - Advokasi Pengembangan BUMDES di Pariwisata Estate	Kab. Kupang, Ende, Malaka, Rote Ndao, TTS	5 kegiatan (175 Orng)	242.661.100

	- Fasilitas Pertemuan Bersama Pelaku Usaha Untuk Pemasaran Produk BUMDesa	Kab. TTS, TTU, Belu, Kupang	4 kegiatan (160 Orng)	138.597.820
	- Pilot BUMDesa Binaan Provinsi NTT	Kab. Kupang, Lembata, Malaka	3 Bumdes	51.999.390
	- Advertorial cetak/Kerjasama media (20 posting)	Provinsi	20 Posting media	
	- Aplikasi Data BUMDes Provinsi NTT	Provinsi	1 paket	179.400.000
<b>B</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>			
<b>1</b>	<b>Kegiatan:</b> Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota <b>Sub Kegiatan:</b>			
1.1	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	21 Kabupaten	1 dokumen	102.745.800
1.2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			
	- Pendampingan dan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Tingkat Provinsi NTT (Insentif Kader Posyandu)	22 Kab/Kota	2.410 Desa/Kel	3.398.445.900
	- Perjalanan dinas pendampingan dan peningkatan kapasitas kader Posyandu	22 Kab/Kota	1 kali	103.272.000
	- Jambore Kader Posyandu	Provinsi (Kota Kupang)	1 kegiatan	95.905.940
	- Lomba Posyandu Untuk Tiap Strata (Pratama, Madya, Purnama dan mandiri) Tingkat Provinsi	22 Kab/Kota	1 kegiatan	177.931.980
	- Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan di Desa dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Masyarakat desa dan Penurunan Angka Stunting di Provinsi NTT	22 Kab/Kota	1 laporan	137.990.300
1.3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Kupang, Ende, Sumba Barat, Belu.	4 kegiatan (124 Orng)	242.955.340
	- Fasilitas Penguatan Kapasitas Kader Pembangunan Manusia Dalam Rangka Penurunan Angka Stunting			



1.4	<p>Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif bagi kelompok UEP</li> </ul>	Kab. Kupang, TTS, TTU	3 kegiatan (105 Orang)	207.635.830
1.5	<p>Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Administrasi Pembangunan Gedung</li> </ul>	Provinsi	1 kegiatan	7.699.970
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan Gelar TTG Tk. Nasional</li> </ul>	Provinsi Jawa Barat	1 kegiatan	193.210.850
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan Gelar TTG Tk. Provinsi</li> </ul>	Kab. Ende	1 kegiatan	168.091.280
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya Pelatihan Pemasangan Sarana Energi Alternatif Biogas</li> </ul>	Kab. Belu	10 unit	129.636.576
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan Terlaksananya Pengembangan/Inovasi Peralatan Teknologi Tepat Guna (TTG)</li> </ul>	Kab. Kupang (Noelbaki)	50 unit	166.865.638
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kabupaten Terlaksananya Pengkajian Pengembangan Produk Unggulan dan Kebutuhan Peralatan TTG</li> </ul>	Kab. Belu, Manggarai Barat, Rote Ndao, Sikka, TTS dan Sumba Barat Daya	6 dokumen	76.272.440
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan gedung Display</li> </ul>	Kab. Kupang (Noelbaki)	1 paket	1.112.000.000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung TTG</li> </ul>	Kab. Kupang (Noelbaki)	1 paket	45.000.000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan Pembangunan Gedung</li> </ul>	Kab. Kupang (Noelbaki)	1 paket	35.000.000
1.6	<p>Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat</p>	Kabupaten Ende	1 Kegiatan	197.382.380
1.7	<p>Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberian PMT Bergizi pada Desa Model I PKK</li> </ul>	22 Kab/Kota (desa/Kel. Model PKK)	2500 Balita, 1.546 Anak PAUD, 1300 Ibu Hamil/ Menyusui, 4.714 Anak SD, 900 Bayi (6-11 Bln) selama 12 Bulan	29.980.279.886
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberian PMT Bergizi pada Desa Model II PKK</li> </ul>	22 Kab/Kota (desa/Kel. Model PKK)	2500 Balita, 981 Ibu Hamil/ Menyusui, 910 Bayi (6-11 Bln) selama 12 Bulan	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan Obat Gizi</li> </ul>	Provinsi (TP-PKK)	79 dos makanan bergizi	

	- Pembuatan Leaflet dan Booklet Pendampingan asupan makanan bergizi bagi keluarga	Provinsi (TP-PKK)	400 lembar, 300 buku	
	- Cetak Tabel Indikator, Buku Menu Pencegahan Stunting	Provinsi (TP-PKK)	150 lembar, 100 buku	
	- Pembuatan Poster PHBS dan Pola Makan Menu B2SA	Provinsi (TP-PKK)	150 lembar, 100 lembar	
	<b>JUMLAH PAGU ANGGARAN .....</b>			<b>46.189.931.598</b>

#### f. KALENDER KEGIATAN TAHUN 2021

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

**g. LAPORAN KINERJA DINAS PMD TAHUN 2020 : (terlampir dalam bentuk LKIP)**

**h. LAPORAN KEUANGAN DINAS PMD TAHUN 2020**

**1. Realisasi Belanja**

**a) Belanja Daerah**

Alokasi Belanja Daerahh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 47.202.156.200,- yang terdiri atas;

- ♦ Belanja Tidak Langsung      Rp. 6.178.014.000,-
- ♦ Belanja Langsung              Rp. 41.024.142.200,-

Oleh karena kondisi Pandemi Covid 19 diseluruh wilayah Indonesia termasuk juga di Nusa Tenggara Timur, maka dilakukan Rasionalisasi dan Refocusing anggaran pada semua Perangkat Daerah termasuk juga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang sampai dengan kondisi terakhir perubahan anggaran sebagaimana Peraturan Gubernur ke 5 tentang Perubahan Anggaran yang termuat dalam DPPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2020 adalah sebagai Berikut:

- ♦ Belanja Tidak Langsung      Rp. 5.852.292.000,-
- ♦ Belanja Langsung              Rp. 11.044.174.346,-
- ♦ Total Belanja Daerah        Rp. 16.896.466.346

**b) Realisasi Belanja Daerah**

Realisasi Belanja Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai dengan 31 Desember 2020 yakni Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp. 5.852.292.000,- dengan realisasi Rp. 5.298.856.104,- (90,54%), dan Belanja Langsung (BL) Rp. 11.044.174.346,- dengan realisasi Rp. 10.420.592.290,- (94,35%). Rincian realisasi tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel : Realisasi Belanja s.d 31 Desember 2020

No	Uraian Belanja	Pagu Dana (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
I	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	5.852.292.000	5.298.856.104	90,54
II	<b>Belanja Langsung</b>	11.044.174.346	10.420.592.290	94,35
	1. Belanja Pegawai	433.020.000	433.020.000	100
	2. Belanja Barang dan Jasa	10.369.943.146	9.745.871.290	93,99
	3. Belanja Modal	242.111.200	241.701.000	99,83
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>16.896.466.346</b>	<b>15.719.448.394</b>	<b>93,03</b>

### c) Realisasi Belanja menurut Pembiayaan

Pembiayaan yang di alokasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari 5 Program dan 28 kegiatan yang realisasi pembiayaannya sebagai berikut:

No	Uraian Pembiayaan	Pagu Dana	Realisasi Pembiayaan	
			Keuangan (Rp)	(%)
1	2	4	5	6
I	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>699.395.800</b>	<b>656.492.790</b>	<b>93,87</b>
1	Penyediaan jasa surat menyurat	10.000.000	9.902.000	99,02
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	104.800.000	101.186.690	96,65
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	51.900.000	51.113.500	98,48
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	74.800.000	74.798.900	100
5	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	8.278.000	8.278.000	100
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	48.967.600	48.967.600	100
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.403.200	17.403.200	100
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Gedung Kantor	4.500.000	4.500.000	100
9	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Per Undang-Undangan	5.744.200	4.116.000	71,65
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	28.000.000	27.997.000	99,99
11	Rapat-rapat Koordinasi & Konsult. Ke Luar Daerah	36.000.000	11.844.400	32,90

12	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras & Barang Dinas	9.000.000	8.836.500	98,18
13	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	30.000.000	30.000.000	100
14	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	240.550.000	240.550.000	100
15	Penyediaan Jaminan Sosial	29.452.800	16.999.000	57,72
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>	<b>232.909.000</b>	<b>(23.591.000)</b>	<b>(9,20)</b>
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	50.000.000	50.000.000	100
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	50.000.000	49.600.000	99,20
3	Pengadaan Meubelair	29.000.000	29.000.000	100
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	11.410.000	11.334.293	99,34
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	85.000.000	80.628.591	94,86
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	7.499.000	7.492.000	99,91
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100</b>
1	Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	5.000.000	100
<b>IV</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	<b>9.707.919.546</b>	<b>9.159.350.916</b>	<b>94,35</b>
01	Pengembangan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	4.048.020.000	3.627.937.970	89,62
02	Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	191.333.300	191.333.300	100
03	Pengembangan Potensi Desa	354.605.000	349.572.500	98,58
04	Pembinaan Pemerintahan Desa	402.333.195	394.852.595	98,14
05	Peningkatan Partisipasi Keluarga Melalui Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	4.711.628.051	4.595.654.551	97,54
<b>V</b>	<b>Program NTT Bangkit</b>	<b>398.950.000</b>	<b>371.693.700</b>	<b>93,17</b>
01	Pengembangan BUMDES di Pariwisata Estate	398.950.000	371.693.700	93,17
	<b>JUMLAH</b>	<b>11.044.174.346</b>	<b>10.420.592.290</b>	<b>94,35</b>

## 2. Realisasi Pendapatan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) turut berkontribusi dimana dalam tahun 2020 ditargetkan PAD sebesar Rp. 35.450.000,- yang mana terdapat kenaikan target dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 16.000.000,- atau kenaikan 54,87%.

Namun oleh karena adanya pandemi covid 19, terjadi revisi Target PAD yang harus dicapai yakni sebesar Rp. 25.000.000,-. Pendapatan Daerah yang dikontribusi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa bersumber dari pengelolaan Balai Teknologi Tepat Guna (TTG). Adapun realisasi sampai dengan Akhir Bulan Desember sebesar Rp. 25.100.000,- (100,40%).

#### **i. INFORMASI LAINNYA (REGULASI)**

- 1) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI tahun 2015 nomor 157);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara RI tahun 2017 nomor 226);
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 9) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 10) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- 11) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa;
- 12) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa

- 14) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 15) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0102);
- 16) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur.